

## ABSTRAK

Demokrasi di Indonesia telah melahirkan sebuah desentralisasi pemerintahan. Dengan adanya desentralisasi, pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk lebih aktif dalam memerlakukan fungsi pemerintahan di daerah. Namun didalam menjalankan fungsi pemerintahan tentu banyak melalui kendala dan permasalahan. Salah satunya adalah dalam hubungan antar lembaga pemerintahan. Sesuai undang-undang didalam menjalankan fungsi pemerintahan eksekutif tidak berdiri sendiri namun berdampingan dengan legislatif. Dan di dalam legislatif sendiri terdapat partai-partai politik yang mempunyai peran kepentingan yang berbeda. Sehingga tidak jarang dengan kepentingan partai itu berujung pada ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan bisa mendeskripsikan sebuah studi kasus tentang pengesahan APBD tahun anggaran 2011 di Kota Surabaya yang pada saat itu mengalami kemoloran didalam pengesahannya. Molornya pengesahan ini terkait hubungan antara eksekutif dan legislatif yang tidak harmonis. Sehingga berdampak pada pembahasan dan pengesahan APBD 2011.

Peran sebuah lembaga legislatif adalah sebagai kontrol pemerintahan. Dengan menggunakan fungsi kontrolnya tersebut legislatif mempunyai *bargaining position* kepada eksekutif untuk melancarkan beberapa kepentingan yang dibawa oleh partai politik. Namun dengan kepentingan yang tidak diakomodasi oleh eksekutif terutama peran walikota, akhirnya ketidakharmonisan terjadi. Komunikasi politik dan mediasi akhirnya berjalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kata kunci : pemerintah daerah, desentralisasi, eksekutif, legislatif, dan APBD.

## ABSTRACT

Democracy in Indonesia has given birth to a decentralized government. With decentralization, local governments were given authority to be more active in the role of government functions in the area. But in the function of many government through obstacles and problems. One is the relationship between institutions of government. As per the law within the executive function of government does not stand alone but together with the legislature. And in the legislature itself there are political parties who have interests different roles. So it is not uncommon with the interests of the party that led to disharmony relationship between the executive and legislative.

With a qualitative approach, this study is expected to describe a case study on the ratification of the fiscal year 2011 budget in the city of Surabaya, which by then had kemoloraa in the endorsement. This endorsement related to the relationship between the executive and legislative that are not harmonious. So the impact on the discussion and ratification of budget 2011.

The role of a legislature is a governmental control. By using these control functions have the bargaining position of the legislative to the executive to launch some interest that was taken by political parties. However, with interests that are not accommodated by the executive, especially the role of mayor, finally disharmony occurs. Political communication and mediation finally walked to solve these problems.

**Keywords:** local government, decentralization, the executive, legislative, and budget.